



POLITEKNIK AGRARIA STPN
PROGRAM STUDI : PERTANAHAN

SILABUS

MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	PN413	2	III (Ganjil)	

DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep hubungan subjek dan objek berupa tanah yang berada di seluruh wilayah Indonesia mulai dari penguasaan pemilikan penggunaan serta pemanfaatan tanah. Selain pemahaman konsep juga merancang pengumpulan data dan informasi P4T, pengolahan data dan analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menjadi informasi yang dapat bermanfaat untuk perumusan kebijakan di bidang pertanahan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Menguasai penyelenggaraan penatagunaan tanah, reforma agraria, dan pemberdayaan hak atas tanah untuk kesejahteraan Masyarakat.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

1. Menjelaskan konsep Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
2. Memahami , menerapkan dan mengolah Data P4T
3. Menganalisis data P4T untuk berbagai kepentingan

Sub-CPMK

1. Mampu menjelaskan konsep dan data P4T
2. Mampu menjelaskan manfaat data dan informasi P4T
3. Mampu memahami dan menerapkan Pengumpulan Data dan informasi P4T
4. Mampu menerapkan cara pengolahan data dan informasi P4T
5. Mampu menganalisis data dan informasi P4T untuk berbagai kepentingan

POKOK BAHASAN

Pertemuan ke /Tanggal	Meteri
1,2,3	Konsep dan data Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4,5,6	Menjelaskan manfaat data dan informasi P4T

POKOK BAHASAN	
	MID TEST (UTS)
9,10	Pengolahan data dan informasi P4T
11,12,13,14,15	Menganalisis data dan informasi P4T untuk berbagai kepentingan
	FINAL TEST (UAS)
PUSTAKA / REFERENSI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Boedi Harsono. (1995).” Hujum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta 2. Parlindungan, A.P. (1984). “Komentar Atas Undang-Undang Pook Agraria”, Alumni, Bandung 3. Parlindungan, A.P. (1998). “Komentar Atas Undang-Undang Pook Agraria”, Mandar Maju, Bandung 4. Direktorat Landreform. (...)” Petunjuk Pelaksanaan Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kemneterian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta 5. UU No. 2 Tahun 2012 6. PP 224 Tahun 1961 7. PP 24 Tahun 1997 8. PMNA NO. 3 Tahun 1997 9. Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 10. Permen ATR/BPN No. 62 tahun 2023 11. NSPK Tahun 2012 12. PP 23 Tahun 2023 13. Pemen LHK No. 7 Tahun 2023 	